

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Literatur

Dalam menyusun dan menyelesaikan penelitian ini, maka pada bab tinjauan pustaka terdiri dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Dimana ada beberapa literatur memiliki topik yang serupa dengan penelitian yang akan dikaji. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tersebut akan menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya pengetahuan pada penelitian yang dikaji.

Literatur pertama yang diteliti oleh Rafi Ramadhan Wiryawan, dan lainnya dengan judul *“Signifikansi Kebijakan “Open-Door Policy” Turki di Bawah Presiden Tayyip Erdogan”*. Literatur ini membahas mengenai kebijakan pintu terbuka sebagai bentuk pengambilan sikap yang dilakukan oleh perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan terhadap Suriah untuk memberikan perlindungan terhadap warga sipil. Dalam literatur ini, menjelaskan bahwa *Open Door Policy* tidak dapat lepas dari peran individu sebagai *decision-maker* dalam mengambil keputusan bagaimana negara harus bersikap. Tidak hanya itu, dalam literatur ini juga menjelaskan bahwa pengaruh situasi internasional yang terjadi saat itu dan peran domestik negara juga mempengaruhi adanya pembentukan kebijakan luar negeri *Open Door Policy* (Wiryawan et al., 2021).

Terdapat beberapa persamaan yang penulis temukan dalam penelitian ini, yaitu membahas mengenai kebijakan *Open Door Policy* yang berlaku di Turki sebagai bentuk rasa peduli Turki terhadap konflik yang terjadi di negara tetangganya. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penelitian ini lebih menekankan analisis terhadap signifikansi *Open Door Policy* dengan menggunakan instrument kebijakan luar negeri individu presiden Recep Tayyip Erdogan dengan melihat latar belakang dan kepribadian sebagai salah satu faktor penentuan, pembuatan, serta pemberlakuan kebijakan *Open Door Policy*. Sedangkan penulis akan mengkaji

pengimplementasian *Open Door Policy* dari sudut pandang feminisme sebagai upaya dalam menangani krisis pengungsi Suriah di Turki.

Literatur kedua yaitu ***“Rebuilding Peace in Exile: Bringing Together The Women, Peace and Security Agenda and The international Refugee Protection Regime in Turkey”*** yang ditulis oleh Irem Sengul dan lainnya. Literatur ini membahas mengenai perdamaian yang harus dibangun pada semua tahap terutama pada pengungsian, diskriminasi dan kekerasan yang dialami oleh perempuan. Sehingga lembaga pengungsi perempuan memiliki peran penting dalam upaya pembangunan perdamaian di tempat pengasingan. Penelitian ini menggunakan pendekatan komprehensif dalam penjabarannya sebagai metode yang efektif dalam melihat perdamaian yang dibangun pada Perempuan. Dalam literatur ini, Irem Sengul dan lainnya menjelaskan bahwa dengan menyatukan kedua rezim yaitu *International Refugee Protection Regime* (IRPR) dan *United Nations Security Council’s Women, Peace and Security* (WPS) dapat mengatasi keterbatasan yang mereka miliki dalam membangun keagenan pengungsi perempuan. Dengan menyatukan kedua rezim ini secara bersamaan juga dapat memperkuat perlindungan serta mendorong peran terhadap pengungsi perempuan sebagai aktor pembangunan perdamaian di tempat pengasingan Turki. Dalam literatur ini juga mendesak agar memasukkan kategori gender dalam kebijakan luar negeri Turki terhadap pengungsi (Sengul et al., 2022).

Terdapat persamaan dalam literatur ini dengan penelitian yang akan dikaji yaitu membahas pembangunan perdamaian berbasis gender pada pengungsi perempuan di tempat pengungsian negara Turki. persamaan lainnya yaitu membahas konvensi internasional mengenai pemberian perlindungan hukum yang setara terhadap pengungsi dan penduduk lokal. Adapun perbedaan antara literatur ini dan penelitian yang akan dikaji yaitu literatur ini lebih menekankan pada rezim internasional dan penyatuan kedua rezim internasional yaitu *International Refugee Protection Regime* (IRPR) dan *United Nations Security Council’s Women, Peace and Security* (WPS) dalam memperkuat perlindungan pengungsi perempuan di Turki. sedangkan penelitian yang akan dikaji melihat kebijakan luar negeri pintu

terbuka dengan kaca mata feminisme dalam menangani krisis pengungsi Suriah di Turki.

Literatur ketiga yaitu ***“Syirian Refugee Women and Girls in Turkey and The Istanbul Convention”*** yang ditulis oleh Canan Güllü. Literatur ini membahas mengenai pengimplementasian konvensi Istanbul dalam konsep feminisme sebagai sebuah alat untuk memerangi dan mencegah kekerasan seksual berbasis gender pada pengungsi anak perempuan dan pengungsi perempuan Suriah. Di dalam literatur ini, Canan Güllü menjelaskan bahwa bagaimana konvensi Istanbul mengakui bahwa kekerasan berbasis gender merupakan suatu bentuk penganiayaan. Kekerasan berbasis gender terjadi karena tidak adanya status pengungsi yang resmi terhadap pengungsi Suriah di Turki. Literatur ini juga menjelaskan bahwa kebijakan yang buta akan gender membuat perlindungan hukum terhadap perempuan menjadi lemah dan perempuan menjadi sangat rentan terhadap kasus kekerasan, pelecehan seksual, dan prostitusi. Konvensi Istanbul adalah konvensi internasional pertama yang membahas gender secara keseluruhan dan Turki adalah negara pertama yang menandatangani konvensi ini. Konvensi Istanbul dianggap gagal karena pengimplementasian yang buruk sehingga Turki keluar dari Konvensi Istanbul pada tahun 2021 (Güllü, 2019).

Persamaan dari literatur ini dan penelitian yang akan dikaji yaitu keduanya membahas mengenai bagaimana upaya Turki dalam memberikan perlindungan dan menerapkan kebijakan terhadap pengungsi perempuan dan pengungsi anak perempuan Suriah, sedangkan perbedaan literatur ini dan penelitian yang akan dikaji ada pada letak kebijakannya. Literatur ini membahas implementasi Konvensi Istanbul sedangkan penelitian yang akan dikaji membahas implementasi *Open Door Policy* sebagai upaya Turki dalam memberikan perlindungan berbasis gender pada Pengungsi Suriah.

Literatur yang keempat berjudul ***“Dampak Kebijakan Pintu Terbuka (Open Door Policy) Turki Bagi Pengungsi Suriah Terhadap Kepentingan Nasional Turki Tahun 2011-2016”*** yang ditulis oleh Syukran dan Ubaidullah. Literatur ini membahas mengenai dampak yang ditimbulkan oleh banyaknya pengungsi Suriah yang hadir ke negara Turki terhadap kepentingan nasionalnya.

Dalam literatur ini, Syukran dan Ubaidillah menjelaskan bahwa kepentingan nasional dianggap sebagai sebuah konsep dalam politik luar negeri, dimana hal ini dapat mengejar kekuasaan yang dapat mengontrol negara lain. Turki memberlakukan *Open Door Policy* sebagai sebuah alat untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Salah satu kepentingan nasionalnya adalah menjadi anggota Uni Eropa (EU). Ketika perang Suriah terjadi, negara-negara di Uni Eropa memiliki krisis pengungsi yang menyebabkan kekacauan yang luar biasa dan Turki menjadi kunci Uni Eropa dalam menangani krisis pengungsi Suriah karena letak geografis Turki yang berdekatan dengan Suriah dan Uni Eropa. Namun dengan diberlakukannya kebijakan *Open Door Policy* ini, membuat Turki mengalami dampak yang cukup ekstrim terutama pada bidang ekonomi dan politik (Syukran & Ubaidillah, 2019).

Persamaan dari literatur ini dan literatur yang akan dikaji yaitu membahas mengenai dampak kebijakan *Open Door Policy* yang Turki berlakukan pada tahun 2011. Adapun perbedaan antara literatur yang akan dikaji dan literatur ini adalah literatur ini membahas dari segi politik luar negeri mengenai kepentingan nasional Turki yang memberlakukan kebijakan *Open Door Policy*. Sedangkan literatur yang akan dikaji akan membahas dari segi perspektif feminisme terhadap kebijakan tersebut.

Literatur kelima berjudul ***“Turkish Daily press Framing and Representation of Syrian Women Refugees and Gender-Based Problem: Implications for Social Integration”*** yang ditulis oleh Nilufer Narlı dan lainnya. Literatur ini membahas mengenai bagaimana berita pers harian Turki dalam memandang pengungsi perempuan Suriah yang ada di Turki dan keterlibatannya pada integrasi sosial disana. Literatur ini melakukan analisis konten antara Januari 2013 sampai 2015 sebanyak 856 berita di Turki, baik dari harian nasional maupun harian lokal. Penelitian ini menggunakan teori *framing and media studies* yang menyatakan bahwa terdapat berbagai kategori masalah berbasis gender pada pengungsi perempuan Suriah, seperti pernikahan dini dan pemaksaan pada pengungsi anak perempuan Suriah, prostitusi paksa, kekerasan seksual berbasis gender, serta kesehatan reproduksi yang buruk. Sehingga membuat citra pengungsi

perempuan Suriah di Turki sangat buruk dan mempengaruhi integrasi sosial di Turki (Narlı et al., 2019).

Perbedaan antara literatur ini dengan penelitian yang akan dikaji adalah penelitian ini membahas mengenai kekerasan berbasis gender dan keterlibatan untuk integrasi sosial melalui persepsi masyarakat dan liputan media Turki terhadap pengungsi perempuan Suriah di Turki, sedangkan penelitian yang akan dikaji membahas hubungan antara kebijakan luar negeri *Open Door policy* dan kekerasan berbasis gender pada pengungsi perempuan Suriah di Turki. Sedangkan persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan dikaji adalah membahas mengenai masalah berbasis gender terhadap pengungsi Suriah di Turki.

## **2.2 Kerangka Teoritis/Konseptual**

Kerangka teoritis adalah sekumpulan teori prespektif yang berfungsi untuk memberi arahan penelitian dalam mengumpulkan informasi dan analisis informasi penelitian, teori juga harus sesuai dengan fenomena yang sedang diteliti (Sahir, 2021). Menurut Neuman, teori merupakan suatu sistem gagasan yang saling berhubungan dan terus berkembang. Teori memiliki berbagai macam bentuk dan ukuran yang bertujuan untuk memperluas serta memperdalam pemahaman kita dalam suatu fenomena yang ada (Neuman, 2014).

### **2.2.1 Feminisme Liberal**

Melihat dari prespektif feminisme, pada dasarnya prespektif ini memperhatikan konstruksi budaya antara pria dan wanita. Dimana dalam keduanya diuji pada persamaan dan perbedaan, interpretasi dan pengalaman dalam berbagai jenis hubungan sosial. Hal ini berbeda dengan seks atau gender, dimana seks adalah jenis kelamin antara pria dan wanita secara biologis (Umar, 1999). Sedangkan gender merupakan suatu sifat yang melekat pada perempuan maupun laki-laki yang diskonstruksikan secara kultural dan sosial (Fakih, 1997). Dalam norma dan struktur sosial banyak yang menegaskan bahwa peran laki-laki lebih mendominasi daripada peran perempuan. Hal ini menyebabkan adanya degradasi peran sehingga

mengakibatkan munculnya diskriminasi karena fungsi dan kedudukan perempuan yang dianggap tidak sederajat dengan laki-laki. Respon terhadap kekerasan, ketidakadilan, dan diskriminasi berbasis gender terhadap perempuan memunculkan sebuah pemikiran dan aliran baru sebagai bentuk perlawanan yang kemudian dinamakan perspektif feminisme (Triantono, 2023).

Menurut Chan dan Moore, mengangkat isu gender pada konteks isu internasional seperti pembuatan kebijakan luar negeri, terorisme, hubungan ekonomi global, peperangan merupakan hal yang penting dalam studi sebagai suatu upaya kolektif yang tidak hanya didominasi oleh maskulinitas saja (Chan & Moore, 2005). Munculnya gerakan feminis sangat berkaitan dengan kondisi kontekstual dan faktual, dimana semuanya berakar dari konstruksi problematik seperti adanya dominasi ketidakadilan atas representasi dan pembentukan hukum dari perspektif konstruksi sosial patriarkh (Sudiono, 2021). Pada akhirnya, kondisi kontekstual dan faktual yang berbeda membuat gerakan feminisme memiliki aliran-aliran pemikiran yang baru seperti feminisme radikal, liberal, postmodern, sosialis dan marxis, global dan multikultur, eksistensialisme/kultural dan ekofeminisme (Hariati, 2017).

Dalam penelitian ini akan menggunakan teori feminisme liberal. Dimana dalam feminisme liberal menekankan pada kesetaraan dan kebebasan dari dominasi peran laki-laki. Menurut Tong, laki-laki dan perempuan harus memiliki akses yang sama terhadap kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan upah, serta peran politik yang setara (Tong, 2017). Karena dalam feminisme liberal dijelaskan bahwa adanya ketidakmampuan perempuan dalam menjalani kehidupan mereka sesuai apa yang mereka inginkan dan tentang perlindungan hak hukum. Dimana perempuan digambarkan sebagai makhluk yang lemah dan tidak cerdas sehingga dianggap tidak memberikan kontribusi terhadap masyarakat, khususnya ekonomi (Mill, 2009).

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan membuat negara-negara di dunia semakin menampakkan dirinya untuk melihat kajian feminisme, khususnya feminisme liberal. Masalah perempuan tidak hanya terletak pada hak-hak hukum dan politik, tetapi juga moralitas yang menindas (Bryson, 1992). Pemikiran ini muncul dan berkembang karena banyaknya kasus prostitusi,

diskriminasi berbasis gender, pelecehan seksual dan rendahnya upah yang diterima oleh perempuan. Karena pada dasarnya feminisme liberal ingin melepaskan perempuan dari peran gender yang menindas (R. Tong, 2009). Kasus-kasus tersebut sering ditemukan pada pengungsi perempuan, khususnya pengungsi perempuan Suriah yang ada di Turki.

Untuk memberantas hal tersebut menurut Mary Maynard, berpendapat bahwa hak-hak individu, kesetaraan, dan keadilan dapat terjadi jika pemerintah terlibat dan melakukan perubahan hukum dan kebijakan sosial (Maynard, 2006). Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat sikap yang Turki ambil terkait krisis pengungsi Suriah untuk memberikan persamaan hak terhadap pengungsi perempuan Suriah di Turki. Hal ini sesuai dengan konsep liberal bahwa kesejahteraan “hak” harus diprioritaskan di atas “kebaikan” dengan adanya intervensi dari pemerintah dalam hal perekonomian (R. Tong, 2009). Prinsip-prinsip liberal yang didasari feminisme tidak cukup untuk menangani tuntutan feminis, hal itu dikarenakan negara tidak hanya menyediakan dan menciptakan hukum yang setara tetapi juga harus ada campur tangan terhadap kelompok yang dianggap memiliki kebutuhan khusus (Bryson, 1992).

Dalam feminisme liberal, dijelaskan bahwa kekerasan gender adalah hal yang harus diperhatikan karena itu bersifat moral yang menindas. Dimana kekerasan gender yang dimaksud bukanlah hanya kekerasan dalam ruang lingkup keluarga dan rumah tangga yang dilakukan oleh pasangan intim, tetapi melampaui ruang dan bentuk tersebut (True, 2021). Pengertian kekerasan berbasis gender menurut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tahun 1993 dalam *Declaration on the Elimination of Violence Against Women* (DEVAW), bahwa “Setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan, atau mungkin akan mengakibatkan penderitaan terhadap perempuan baik secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk didalamnya terdapat ancaman, perampasan atau pemaksaan kebebasan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum ataupun didalam kehidupan pribadi” (General Assembly, 1993).

Berdasarkan teori yang telah dijabarkan, teori ini dianggap relevan dengan penelitian yang akan diteliti. Dimana pengungsi perempuan Suriah memerlukan

hak dan kebebasan individu karena pengungsi perempuan Suriah seringkali mendapatkan moralitas yang menindas seperti kekerasan gender. Dalam definisi kekerasan gender sendiri itu merupakan kekerasan yang berdampak dan merugikan terhadap anak perempuan dan perempuan, baik secara fisik, seksual, emosional, dan psikologis. Sehingga kesetaraan hak dan kebebasan individu dapat tercapai jika Turki sebagai sebuah negara ikut turun tangan dalam memperjuangkan kesetaraan hak dan kebebasan individu terhadap pengungsi perempuan Suriah yang sesuai dengan konsep feminis liberal.

### **2.2.2 Kebijakan Luar Negeri Feminis**

Dalam kebijakan luar negeri sudah mulai mengakui bahwa adanya hubungan antara keamanan nasional, internasional, keamanan perempuan, dan norma-norma yang pro-gender semakin meningkat di dalam studi hubungan internasional. Hal itu dikarenakan adanya proses dimana isu-isu yang mendesak berpindah dari satu konteks kepada konteks lain yang dianggap penting dalam politik (Aggestam & Rosamond, 2018). Kebijakan luar negeri feminis merupakan sebuah pendekatan yang mengintegrasikan perspektif gender dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek kebijakan luar negeri suatu negara (Nylund et al., 2023). Kekerasan terhadap perempuan harus dianalisis dalam konteks sosial tertentu agar cara dan penyebab terjadinya kekerasan dapat diatasi dan dipahami dengan baik. Sebab dalam kebijakan luar negeri feminis, masalah perempuan dianggap sebagai tanggungan secara universal (Mohanty, 1984).

Tantangan dari kebijakan luar negeri feminis adalah tidak adanya definisi Tunggal mengenai kebijakan luar negeri feminisme, sehingga banyak interpretasi mengenai feminisme yang mengakibatkan negara-negara didunia mempunyai pandangan yang berbeda dalam menafsirkan kata “feminisme” dalam konsep kebijakan luar negeri mereka (Papworth, 2024). Sedangkan Menurut Thompson dan Clement, kebijakan luar negeri feminis ialah kebijakan suatu negara berdaulat berlandaskan teori kesetaraan politik, sosial, dan ekonomi yang dalam interaksinya dengan negara berdaulat lainnya untuk memajukan upaya hak dan kepentingan perempuan (Thompson & Clement, 2019). Dalam konsep ini, kebijakan luar negeri

suatu negara sangat bergantung dengan peran, norma, dan struktur gender. Karena biar bagaimanapun, hal ini bukan berarti memasukan perempuan kedalam sebuah sistem. Tetapi, bagaimana nilai gender tersebut masuk kedalam berbagai kebijakan luar negeri (Scheyer & Kumskova, 2019).

Secara historis, perempuan terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan internasional dan kebijakan luar negeri. Hal ini terjadi karena dampak dari tindakan sehari-hari masyarakat didunia yang tidak melibatkan perempuan dalam berbagai aspek (Cheung et al., 2021). Kebijakan luar negeri feminis memiliki tujuan yang sama dengan kebijakan luar negeri lainnya yaitu tentang membangun pembangunan manusia, perdamaian, keadilan, dan hak asasi manusia. Namun, dalam kebijakan luar negeri feminis mengakui bahwa negara tidak akan mencapai tujuan tersebut tanpa adanya penyesuaian terhadap kebijakan-kebijakan yang ada seperti upaya menangani diskriminasi, kekerasan dan pengucilan yang masih dialami oleh perempuan. Sehingga “feminisme” dan perempuan dianggap sebagai kunci dari terwujudnya kebijakan luar negeri yang visioner (Robinson, 2021).

Kebijakan luar negeri feminis telah dianut oleh beberapa negara, salah satunya adalah Luksemburg. Pemerintah Luksemburg menyatakan bahwa kebijakan luar negeri feminis itu berlaku terhadap seluruh upaya diplomasi, pembangunan dan pertahanan. Luksemburg yang melibatkan tiga prioritas tematik, yaitu pertama, memajukan hak asasi dan perlindungan terhadap anak perempuan dan perempuan. Dimana didalamnya terdapat hak integritas, keamanan, pendidikan, reproduksi, hak seksual, kesehatan serta perjuangan melawan kekerasan terhadap perempuan baik eksploitasi seksual maupun pelecehan seksual sebagai senjata perang. Kedua, perwakilan dan partisipasi perempuan baik dalam pemilu, pendidikan, perekrutan dengan aspek kesetaraan gender. Ketiga, meningkatkan kesetaraan gender dalam *Ministry of Foreign and European Affairs* (MFEA) (Thompson & Clement, 2019).

Melihat konsep kebijakan luar negeri feminis yang telah dijabarkan, maka konsep ini dianggap relevan dengan penelitian yang akan dikaji. Dimana perempuan telah lama terpinggirkan dari kebijakan luar negeri dan dalam pengambilan keputusan internasional sehingga beberapa kebijakan didominasi oleh

kaum marjinal. Dengan konsep ini, negara-negara didunia semakin memperhatikan bahwa adanya pentingnya aspek keterlibatan antara keamanan nasional, internasional, dan norma pro-gender. Khususnya pada kasus pengungsi perempuan Suriah di Turki yang menjadi kelompok rentan.

### **2.2.3 Pengungsi dalam Prespektif Feminis**

Dalam prespektif feminisme setiap individu memiliki perbedaan yang sangat kompleks dan banyak sekali identitas yang saling bersinggungan. Hal ini mengacu pada perbedaan dari berbagai dimensi dan dibentuk oleh persinggungan gagasan mengenai kelas, gender, ras, etnis, agama, bangsa, usia dan kemampuan (Kelly, 2019). Perbedaan identitas tersebut dapat menghubungkan individu satu sama lain dan memerlukan solidaritas yang tinggi untuk mencapai keamanan dan persamaan hak pada perempuan (Mohanty, 1988). Pengungsi korban bencana dan perang yang melarikan diri saat ini sangat bersifat gender, dimana anak-anak dan perempuan tidak berdaya dan terlantarkan. Sehingga kelompok ini menjadi sangat rentan terhadap diskriminasi gender dan pelecehan seksual (Espiritu & Duong, 2018).

Prespektif feminisme melihat bahwa pengungsi merupakan kelompok yang sama seperti kelompok marjinal lain yang memerlukan kemandirian dan kebebasan, khususnya pada pengungsi perempuan (Riadhussyah et al., 2021). Saat ini, teori feminis mulai mengonseptualisasikan situasi pengalaman perempuan dan geopolitik dengan militerisme dan perang. Status dan posisi perempuan bersifat ganda dan saling bersinggungan yang menentukan identitas gender mereka serta kurangnya akses perempuan terhadap kekuasaan. Hal ini membuat adanya titik temu antara realita sosial dan identitas dengan isu-isu berbasis gender pada pengungsi perempuan. Dimana laki-laki dan perempuan memiliki peran yang berbeda dalam situasi perang dan pasca perang (Begikhani et al., 2018). Kehidupan sehari-hari pengungsi perempuan di kamp sangat dipengaruhi oleh sifat dan kebudayaan dari negara asalnya yang membuat mereka memiliki masa depan yang tidak pasti. Hal itu dikarenakan ketidakmampuan pengungsi perempuan untuk mempengaruhi situasi kehidupan mereka (Dilger & Dohrn, 2016).

Konsep pengungsi dalam prespektif feminis merupakan sebuah prespektif yang menentang pendekatan realis. Dimana realis hanya berfokus pada kekuatan militer dan keamanan negara. Hal ini membuat pengungsi seringkali dianggap sebagai ancaman keamanan negara yang disinggahi oleh pengungsi. Sedangkan pendekatan feminisme adalah pendekatan yang mempromosikan jalur damai untuk mengurangi kasus kekerasan dan berupaya meningkatkan kesejahteraan serta keselamatan pada setiap kelompok, khususnya pada pengungsi perempuan (Rose, 2016). Dalam karakteristik gender yang maskulin dan feminis, pengungsi sering kali digambarkan sebagai beban yang kebergantungan, namun mereka dapat mandiri jika diberdayakan melalui kebijakan yang mendukung dan adanya keterlibatan serta kontribusi mereka dalam masyarakat (Shinn, 2017).

Ancaman keamanan terhadap perempuan tidak hanya berasal dari konflik yang bersenjata, tetapi juga berasal dari bencana alam, kemiskinan, kelaparan, dan penyakit. Kebijakan yang kurang mempertimbangkan prespektif gender dalam implementasinya, sering kali gagal dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh perempuan. Sehingga menurut pandangan feminis, hal tersebut memicu adanya kebutuhan mendesak mengenai perlindungan dan kebijakan terhadap anak-anak dan perempuan dalam situasi pengungsian yang berkebutuhan khusus. Hal ini dikarenakan anak-anak dan perempuan menjadi kelompok yang rentan terhadap kurangnya akses sumber daya, eksploitasi, dan kekerasan selama mereka berada di kamp (Tripp et al., 2013).

Berdasarkan konsep yang telah dijelaskan, konsep pengungsi dalam prespektif feminis merupakan hal yang relevan dengan penelitian yang akan dikaji. Dimana prespektif feminis menentang adanya pemikiran realis bahwa pengungsi merupakan beban dan ancaman keamanan untuk negara yang disinggahi. Sehingga pengungsi perempuan Suriah di Turki memiliki berbagai tantangan yang cukup besar untuk melanjutkan kehidupan mereka di negara penampungan karena mereka memainkan peran ganda dalam kehidupan sehari-hari mereka.

### **2.3 Asumsi Penelitian**

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan penulis, memunculkan adanya asumsi bahwa: “Turki mengimplemetasikan *Open Door Policy* sebagai upaya keterbukaan terhadap krisis pengungsi Suriah. Hal ini dilihat melalui teori feminisme liberal dalam kasus kekerasan gender terhadap pengungsi perempuan Suriah di Turki dengan ruang lingkup yang luas, seperti kurangnya akses terhadap layanan dan pendidikan, prostitusi, pernikahan anak dibawah umur dan pekerjaan dengan upah yang rendah. Sehingga *Open Door Policy* tidak bersifat feminis karena didalamnya tidak mengintegrasikan pemberdayaan perempuan dan tidak mengintegrasikan prespektif feminisme.”

## 2.4 Kerangka Analisis

